

JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

Jornal of Economic Studies

Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2018

ANALISIS PENGARUH ANGKATAN KERJA DAN INFLASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA DALAM KAJIAN EKONOMI MAKRO ISLAM

Amsah Hendri Doni, Iiz Izmuddin

PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMITMEN ORGANISAS TERHADAP KINERJA INTERNAL AUDITOR (Pada PDAM Kota Bandung)

Feni Lestari

MORAL EKONOMI PETANI MISKIN DI JORONG TABEL NAGARI TABEL KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

Vivi Yulia Nora

PENGARUH RASIO SOLVABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012 - 2016

Fitria

HUBUNGAN SIMULTAN ANTARA AKTIVITAS PENGAWASAN PERUSAHAAN DENGAN KINERJA PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Habibatur Ridhah

PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT BANK SYARIAH BUKOPIN

Indah Tri Wulandari, Tartila Devy

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2011-2015

(studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh)

Adilla Juita Siska, Nono Afrianto



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2011-2015

(Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh)

Adilla Juita Siska¹,

STIE Haji Agus Salim Bukittinggi

Email : adillajuitasiska@gmail.com

Nono Afriyanto

STIE Haji Agus Salim Bukittinggi

Email : nonoafriyanto@gmail.com

Diterima: 19 Maret 2018

Direvisi : 27 Mei 2018

Diterbitkan: 30 Juni 2018

ABSTRACT

Public Sector Organizations are required to pay attention to value for money in running their activities. The desired goals of the community include accountability regarding the implementation of value for money, which is economical in the procurement and allocation of resources, efficient in the use of resources in the sense that their use is minimized and the results are maximized, and effective in the sense of achieving goals and objectives.

The purpose of this study is to know the budgeting description and analyze the effectiveness and efficiency of budget usage at the General Election Commission Payakumbuh. Data analysis used descriptive analysis using effectiveness and efficiency ratio. Description of budgeting shall be conducted in stages starting from the Regency / City, Provincial and Central level, the Central the commission the general election shall have full authority to add and subtract the budget stated in a list of stuffing the implementation of the budget of Work Unit (satker). Level and criteria of effectiveness of budget usage at Payakumbuh General Election Commission from 2011 until 2015 is very varied. The highest level of effectiveness occurred in 2015 and the lowest occurred in 2012. The use of the 2011 budget, 2015 is categorized as effective, in 2012, 2013 and 2014 categorized quite effective. KPU Payakumbuh assess when the planned activities / programs have been realized and in accordance with the expected, then the activity is said to be effective. Implementation of Expenditure Budget KPU Payakumbuh Year from 2011 to 2015, as a whole has been processed efficiently. Implementation of the 2011 to 2015 budget, categorized as very efficient only in 2013 and 2014 is categorized as inefficient because in that year KPU Payakumbuh City does not budget Budget Stages of Implementation of Legislative Elections and Election of President and Vice President.

Keywords: effectiveness, efficiency, and budget

ABSTRAK

Organisasi Sektor Publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi penganggaran dan menganalisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Deskripsi penganggaran dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. KPU Pusat mempunyai kuasa penuh terhadap penambahan dan pengurangan anggaran belanja yang tertuang di dalam DIPA Satuan Kerja (satker). Tingkat dan kriteria efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dari tahun 2011 s.d 2015 sangat bervariasi. tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada 2015 dan yang terendah terjadi pada 2012. Penggunaan anggaran belanja tahun 2011, 2015 dikategorikan efektif, tahun 2012, 2013 dan 2014 dikategorikan cukup efektif. Pelaksanaan anggaran Belanja KPU Kota Payakumbuh Tahun

2011 s.d 2015, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2011 sampai 2015, dikategorikan sangat efisien hanya tahun 2013 dan 2014 dikategorikan tidak efisien dikarenakan pada tahun tersebut KPU Kota Payakumbuh tidak menganggarkan anggaran tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kata kunci : efektivitas, efisiensi, dan anggaran belanja

Pendahuluan

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Sedangkan secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan (Mahmudi 2010). Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan jaminan keberlangsungan dari suatu instansi.

Efektivitas anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dimana kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah mampu melakukan efektivitas belanja dan mampu mengefisienkan anggaran sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Mahmudi (2005) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”

Efektivitas anggaran dapat diukur dari tingkat realisasi (pencapaian), dimana di instansi pemerintah seperti KPU Kota Payakumbuh dinamakan realisasi belanja, bila realisasi belanja mendekati jumlah anggaran, mencapai target dan tepat sasaran maka menampakkan kinerja yang baik (*good performance*). Namun jika sebaliknya jika penyerapan sangat jauh dari harapan maka akan berdampak buruk terhadap kinerja instansi (*bad performance*).

Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh merupakan salah satu satuan kerja (satker) dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebagai lembaga vertikal penetapan anggaran di Komisi Pemilihan Umum dilakukan secara berjenjang. Sebelum penetapan anggaran tentu diawali dengan proses penyusunan anggaran sebagai bagian

dari siklus anggaran. KPU Kota Payakumbuh melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh KPU, kemudian dijabarkan pada fungsi, kegiatan, *output and outcome* yang jelas. Namun dari pengamatan awal seringkali penetapan anggaran yang dituangkan dalam bentuk DIPA dan RKA-KL di masing-masing KPU Kab/ Kota tidak sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan sebelumnya, dan itu memungkinkan adanya pelaksanaan anggaran yang tidak efektif dan tidak efisien pada tahun berjalan di Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan atau karena penetapan standar harga satuan yang jauh melebihi nilai pasar, dan tentu ini sangat berpengaruh terhadap kinerja instansi.

Dapat dilihat dari laporan keuangan KPU Kota Payakumbuh tahun 2015, target dan realisasi penggunaan anggaran belanja tahun 2015 yaitu:

1. Belanja pegawai : target anggaran sebesar Rp. 864.584.000, realisasi Rp. 862.882.033 (99,80%).
2. Belanja barang : target anggaran sebesar Rp. 628.157.000, realisasi Rp. 585.797.464 (93,26%).

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan: *Pertama*, hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. *Kedua*, justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diamanatkan dalam anggaran, oleh

karena itu, perlu dilakukan analisis yang akurat dalam anggaran.

Sebagai badan pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum perlu mengevaluasi penggunaan anggaran belanja dan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penggunaan anggaran belanja sehingga anggaran belanja dapat digunakan secara optimal. Dari gambaran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011 – 2015 (Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh)”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yakni: Pertama, bagaimana deskripsi penganggaran KPU Kota Payakumbuh periode 2011-2015?. Kedua, bagaimana tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja pada KPU Kota Payakumbuh Periode 2011-2015?. Ketiga, bagaimana tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada KPU Kota Payakumbuh Periode 2011-2015?

Adapun tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui deskripsi penganggaran KPU Kota Payakumbuh periode 2011-2015. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja pada komisi pemilihan umum Kota Payakumbuh periode 2011-2015. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada komisi pemilihan umum Kota Payakumbuh periode 2011-2015.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam dunia kerja sesungguhnya serta tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis terutama untuk

menunjang keahlian dalam pekerjaan. 2) Bagi instansi, dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi penyelenggara di KPU Kota Payakumbuh dalam penetapan dan penggunaan Anggaran Belanja. 3) Bagi akademik, penelitian ini diharapkan berguna dan menambah kepustakaan bagi jurusan serta menambah wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa STIE – HAS.

Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Menurut Nafarin (2012) mengemukakan bahwa : “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.” Sedangkan pengertian anggaran menurut *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)* yang dikutip oleh Haruman (2010) mengemukakan bahwa : “Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) anggaran operasi mempunyai empat tujuan utama sebagai berikut :

1. Untuk menyesuaikan rencana strategis;
2. Untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi;
3. Untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer, untuk mengotorisasi jumlah yang berwenang yang mereka gunakan, dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka;
4. Untuk memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer.

Sedangkan menurut Nafarin (2004) selain mempunyai manfaat, anggaran juga memiliki kelemahan, antara lain :

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian;
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran yang lengkap (komprehensif) dan akurat;
3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif.

Berdasarkan uraian mengenai tujuan dan manfaat anggaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa manfaat utama dari anggaran adalah sebagai pengendalian manajemen dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Anggaran dapat dijadikan standar untuk mengukur prestasi, mengordinasikan, menghubungkan, dan mengintegrasikan rencana operasional organisasi dalam pencapaian target dengan pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya, sektor publik menyusun seluruh kegiatan dalam program kerja dalam sebuah anggaran. Menurut Bastian (2013) menyatakan bahwa: "Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter."

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran sektor publik, berikut karakteristik anggaran yang dikemukakan Sumarsono (2010) :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan;
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun;

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran;
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran;
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu.

Menurut Mardiasmo (2009) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya.

Efektivitas adalah suatu keadaan mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya (The Liang Gie, 2001).

Gibson (1984) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu:

1. Pendekatan Tujuan

Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan.

Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. Pendekatan Teori Sistem

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, di mana organisasi menjadi bagiannya.

3. Pendekatan *Multiple Constituency*

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi.

Mardiasmo (2006) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan pengertian efisiensi menurut Siagian (1999) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah perbandingan yang terbaik antara *input* dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain berhubungan dengan apa yang telah diselesaikan.

Namun hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi hanya diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir yang memungkinkan tidak tercapainya sasaran dan produktifitas.

Selanjutnya, *Efisiensi* dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang

dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah diartikan setiap belanja yang dilaksanakan pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut dipenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien, sehingga terdapat dua komponen dalam pengukuran efisiensi yaitu *technical efficiency* atau efisiensi teknis: mencoba mengukur tingkat penggunaan dari sarana ekonomi/sejumlah input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, dan *alocative efficiency* atau efisiensi alokatif: mengukur sampai sejauh mana kombinasi optimal dari ragam *input* yang digunakan dalam proses pengeluaran (Pratiwi, 2007).

Metode Penelitian

Penelitian ini dimulai semenjak bulan November 2016, lokasi penelitian adalah di kantor komisi pemilihan umum Kota Payakumbuh Jalan Rangkyo Rasuna Said Komp. GOR M. Yamin Kubu Gadang Kota Payakumbuh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder eksternal yang bersifat kuantitatif. Data sekunder ini diambil selama 5 tahun terakhir (2011 s/d 2015) dikarenakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 baru mulai berlaku efektif pada tahun 2007.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*librari research*) yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku pedoman, laporan keuangan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan alat analisa rasio efektivitas dan rasio efisiensi

(Mahmudi: 2007) yaitu : (1) Rasio efektivitas, yakni dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan target anggaran belanja. (2) Rasio efisiensi, yaitu dengan cara membandingkan target anggaran belanja dengan anggaran yang diajukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Dalam suatu

organisasi, anggaran memegang peran penting karena ia menjadi jaminan keberlangsungan dari suatu instansi. Anggaran rutin KPU Kota Payakumbuh berasal dari APBN yang digunakan dalam satu tahun berjalan. Perencanaan anggaran belanja dimulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat pusat dimana KPU RI mempunyai kuasa penuh terhadap pengurangan dan penambahan anggaran yang telah diajukan dari tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 1

Pengajuan Anggaran dan Anggaran Belanja yang diterima sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Serta Revisi Terakhir

No	Tahun	Penganggaran Rp.	Anggaran Yang diterima (DIPA) Rp.	Revisi Terakhir (DIPA) Rp.
1	2	3	4	5
1	2011	8.512.210.375	1.279.045.000	1.348.335.000
2	2012	4.362.500.000	472.725.311	1.990.863.000
3	2013	4.750.000.000	6.346.595.000	7.199.561.000
4	2014	8.314.800.000	10.457.040.000	9.054.015.000
5	2015	5.473.968.000	1.375.163.000	1.492.741.000

Sumber : Laporan Keuangan dan Penganggaran KPU Kota Payakumbuh

Pada tahun 2011 KPU Kota Payakumbuh menganggarkan anggaran sebesar Rp. 8.512.210.375 sedangkan anggaran belanja yang diterima sesuai dengan DIPA yang diterbitkan sebesar Rp. 1.279.045.000, selanjutnya tahun 2012 dimana penganggaran anggaran sebesar Rp. 4.362.500.000 anggaran belanja yang diterima sesuai DIPA sebesar Rp. 472.725.311, pada tahun 2013 penganggaran anggaran sebesar Rp. 4.750.000.000 sedangkan anggaran belanja yang diterima sesuai dengan DIPA tahun 2013 sebesar Rp. 6.346.595.000 pada tahun ini anggaran belanja lebih besar diterima dari penganggaran karena pada tahun ini terjadi pelaksanaan tahapan pemilihan anggota DPRD RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Anggaran tersebut tidak dianggarkan ditingkat Kabupaten/Kota tetapi KPU Pusat mempunyai kuasa penuh terhadap penambahan anggaran untuk setiap satker di tingkat Provinsi dan Kabuapten/Kota, selanjutnya pada tahun 2014 KPU Kota Payakumbuh menganggarkan anggaran

sebesar Rp. 8.314.800.000. Sedangkan anggaran belanja yang diterima sesuai dengan DIPA sebesar Rp. 10.457.040.000 pada tahun ini sama dengan tahun sebelumnya dimana anggaran yang diterima lebih besar dari penganggaran karena pada tahun ini terjadi Pemilihan Legislatif, Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggaran pelaksanaan Pemilu tersebut ditambahkan ke dalam DIPA 076 KPU Kota Payakumbuh oleh KPU Pusat, selanjutnya pada tahun 2015 penganggaran anggaran sebesar Rp. 5.473.968.000, anggaran belanja yang diterima sesuai dengan DIPA sebesar Rp. 1.375.163.000. Guna penggunaan anggaran secara optimal KPU Kota Payakumbuh merevisi anggaran sehingga dapat meningkatkan realisasi anggaran pada akhir tahun sehingga realisasi pada akhir tahun lebih tinggi.

Hasil Analisis

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005).

Perhitungan efektivitas menggambarkan kemampuan sektor publik dalam menggunakan anggaran belanja yakni

dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang dilihat dalam tabel 2 dan tingkat efektivitas dihitung dari tahun 2011 s.d 2015.

Tingkat efektivitas digolongkan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan tabel 2 berikut :

No	Persentase	Keterangan
1	2	3
1.	90 % s.d 100 %	Efektif
2.	60 % s.d 89 %	Cukup Efektif
3.	dibawah 60 %	Tidak Efektif

Tabel 2

dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran belanja dan *output* adalah target anggaran belanja.

$$\text{Tahun 2011} = \frac{1.259.732.691}{1.348.335.000} \times 100\% = 93,44 \%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{1.456.528.444}{1.990.863.000} \times 100\% = 73,16 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{6.201.873.369}{7.119.561.000} \times 100\% = 87,11 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{7.814.672.494}{9.054.015.000} \times 100\% = 86,31 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.448.679.497}{1.492.741.000} \times 100\% = 97,05 \%$$

Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran belanja KPU Kota Payakumbuh dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{EFEKTIVITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi (2007)

Berdasarkan rumus di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *outcome*

Tabel 3

Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2011 s.d 2015

No	Tahun Anggaran	Target/ Output (Rp)	Realisasi/ Outcome (Rp)	Efektivitas	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	2011	1.348.335.000	1.259.732.691	93,44 %	Efektif
2.	2012	1.990.863.000	1.456.528.444	73,16 %	Cukup Efektif
3.	2013	7.119.561.000	6.201.873.369	87,11 %	Cukup Efektif
4.	2014	9.054.015.000	7.814.672.494	86,31 %	Cukup Efektif
5.	2015	1.492.741.000	1.448.679.497	97,05 %	Efektif
Rata-rata				87,41%	Cukup Efektif

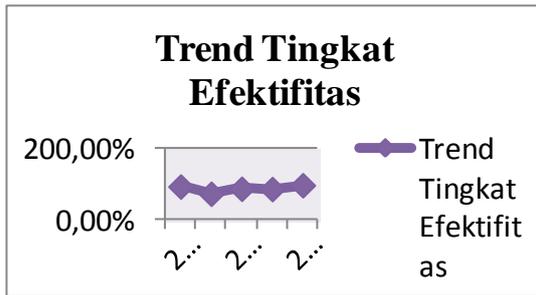
Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat di ketahui bahwa tingkat efektivitas pada komisi pemilihan umum Kota Payakumbuh dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran sebesar 93,43% pada tahun 2011 termasuk dalam kategori efektif.

2. Penyerapan anggaran sebesar 73,16% pada tahun 2012 dikategorikan cukup efektif, sesuai dengan laporan keuangan pada tahun 2012 di mana realisasi pada anggaran belanja barang turun karena pada tahun tersebut ada kegiatan yang tidak berjalan yakni anggaran untuk

- pelaksanaan seleksi Anggota KPU Kab/Kota sedangkan pada tahun ini belum dilaksanakan karena belum habisnya masa kerja anggota KPU sehingga anggaran yang tidak digunakan tersebut menjadi anggaran sisa sehingga berdampak terhadap realisasi/*outcome* pada akhir tahun.
3. Pada tahun 2013 yakni sebesar 87,11%, penggunaan anggaran belanja dikategorikan cukup efektif, dikarenakan pada tahun ini tingkat realisasi di bawah 90% di mana sesuai dengan laporan keuangan penyebab rendahnya realisasi/*outcome* yakni rendahnya penyerapan pada anggaran belanja barang, di dalam anggaran tersebut kegiatan yang tidak terlaksana menyisakan sisa anggaran yang besar, oleh KPU RI sisa tidak boleh direvisi dan harus dikembalikan ke negara diantaranya:
 - 1) Seleksi anggota KPU;
 - 2) Bimtek penyelenggaraan pemilu;
 - 3) Pencalonan DPD, DPRD Kab/Kota;
 - 4) PAW anggota DPRD Kota Payakumbuh;
 - 5) Sosialisasi penyelenggara pemilu;
 - 6) Bantuan hukum penyelesaian kasus pemilu 2014.
 4. Pada tahun 2014 yakni 86,31% pada tahun ini sama dengan tahun sebelumnya di mana dikategorikan cukup efektif dalam penggunaan anggaran belanja, di mana pada tahun ini realisasi/*output* rendah dikarenakan rendahnya penyerapan pada belanja modal dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan, kegiatan yang tidak terlaksana yakni :
 - a. Pengadaan kelengkapan TPS
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - c. Sosialisasi implementasi pemutakhiran data pemilih pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - d. Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 putaran II (dua), sebagaimana kita ketahui pelaksanaan presiden dan wakil presiden tahun 2014 hanya dilaksanakan I (satu) putaran.
 - e. Anggaran tidak terpakai/digunakan sehingga akan berdampak terhadap realisasi/*outcome* pada akhir tahun sehingga realisasi pada akhir tahun menurun.
5. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan efektivitas penggunaan anggaran yakni sebesar 97,05% di mana tingkat penggunaan anggaran belanja paling efektif terjadi pada tahun 2015 dikarenakan indeks persentase paling tinggi dari 4 (empat) tahun sebelumnya. Sesuai dengan pemaparan di atas dapat disimpulkan penggunaan anggaran belanja pada KPU Kota Payakumbuh dari Tahun 2011 s.d 2015 dikategorikan cukup efektif dengan indeks persentase rata-rata adalah sebesar 87,41%. Gambar di bawah ini bertujuan menggambarkan tingkat efektivitas dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang dihasilkan dari penghitungan rasio efektivitas. Pada grafik ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja di tahun 2011 merupakan tahun ke dua terbaik dengan tingkat efektivitas 93,43%, kemudian turun pada tahun 2012 sebesar 73,16%, kemudian naik di tahun 2013 mencapai 87,11%, dan di tahun 2014 turun sedikit sebesar 86,31% dan pada tahun 2015 merupakan tahun terbaik dalam penggunaan anggaran belanja dimana tingkat efektif mencapai 97,05%.



Gambar 1 Trend Tingkat Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2011 s.d 2015
 Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Analisis Efisiensi

Menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010), efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Tingkat efisiensi KPU Kota Payakumbuh dihitung dengan perbandingan antara target anggaran belanja dengan anggaran yang diajukan sebelumnya (penganggaran) yang dilihat dalam tabel 3 dan tingkat efisiensi dihitung dari tahun 2011 s.d 2015.

Tingkat efisiensi digolongkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan tabel 4 pada berikut :

Tabel 4
Kategori Tingkat Efisiensi

No	Persentase	Keterangan
1	2	3
1.	dibawah 80 %	Efisien
2.	81 % s.d 100 %	Cukup Efisien
3.	dias 100 %	Tidak Efisien

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Tingkat efisiensi KPU Kota Payakumbuh dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$EFISIENSI = \frac{OUTPUT}{INPUT} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi (2007)

Berdasarkan rumus di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *output* dalam dalam penelitian ini yakni target anggaran belanja dan *input* merupakan anggaran yang telah diajukan sebelumnya (penganggaran).

$$\text{Tahun 2011} = \frac{1.348.335.000}{8.512.210.375} \times 100\% = 15,84 \%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{1.990.863.000}{4.362.500.000} \times 100\% = 45,64 \%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{7.119.561.000}{4.750.000.000} \times 100\% = 149,89 \%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{9.054.015.000}{8.314.800.000} \times 100\% = 108,89 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.492.741.000}{5.473.968.000} \times 100\% = 27,27 \%$$

Tabel 5
Tingkat Efisiensi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2011 s.d 2015

No	Tahun Anggaran	Penganggaran / Input (Rp)	Target / Output (Rp)	Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	2011	8.512.210.375	1.348.335.000	15,84 %	Efisien
2	2012	4.362.500.000	1.990.863.000	45,64 %	Efisien
3	2013	4.750.000.000	7.119.561.000	149,89 %	Tidak Efisien
4	2014	8.314.800.000	9.054.015.000	108,89 %	Tidak Efisien
5	2015	5.473.968.000	1.492.741.000	27,27 %	Efisien
Rata-rata				69,5	Efisi

0 % en

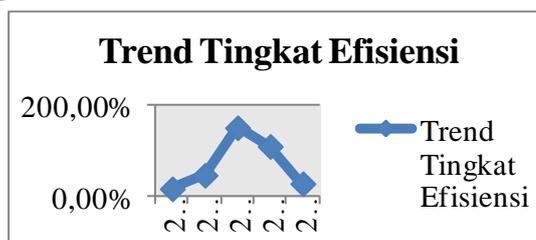
Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi paling tinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 15,84% yang dapat dikategorikan efisien.
2. Pada tahun 2012 yakni 45,64% dalam kategori efisien.
3. Pada tahun 2013 yakni 149,89% di mana pada tahun ini dikategorikan tidak efisien karena *target/output* lebih besar dari *penganggaran/input* dikarenakan pada tahun ini KPU Kota Payakumbuh tidak menganggarkan anggaran tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif karena pada tahun ini pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara nasional dan anggaran tersebut ditambahkan ke dalam DIPA oleh KPU Pusat.
4. Selanjutnya pada tahun 2014 tingkat efisiensi 108,89% pada tahun ini sama dengan tahun sebelumnya dimana dikategorikan tidak efisien karena *target/output* dari anggaran belanja lebih besar dari *penganggaran/input* dimana pada tahun ini hampir sama pada tahun sebelumnya dimana KPU Kota Payakumbuh tidak menganggarkan anggaran pelaksanaan pemilihan legislatif serta pelaksanaan tahapan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggaran tersebut dimasukkan oleh KPU pusat ke dalam DIPA KPU Kota Payakumbuh sehingga KPU Kota Payakumbuh melaksanakan tahapan dan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan anggaran yang diterima dan yang tersedia pada DIPA.

5. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan efisiensi yakni sebesar 27,27% dimana pada tahun ini tingkat efisiensi turun dari dua tahun sebelumnya dikategorikan efisien

Sesuai pemaparan tersebut dapat disimpulkan tingkat efisiensi dari tahun 2011 s.d 2015 dikategorikan efisien dengan indeks persentase rata-rata adalah sebesar 69,50 %.



Gambar 2 Trend Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2011 s.d 2015
Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Gambar 2 menggambarkan tingkat efisiensi di atas melihat tingkat tidak efisiensi terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 dan tingkat efisiensi terjadi pada tahun 2011, 2012 dan tahun 2015.

Tingkat Efisiensi KPU Kota Payakumbuh dihitung dengan perbandingan antara target anggaran belanja dengan anggaran yang diajukan sebelumnya (*penganggaran*) yang dilihat dalam tabel 3 dan tingkat efisiensi dihitung dari tahun 2011 s.d 2015.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Deskripsi penganggaran KPU Kota Payakumbuh, penganggarnya dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Kota, Provinsi

Sumatera Barat dan di tingkat Pusat, anggaran yang diajukan setiap tahunnya bervariasi pada tahun 2011 pengangggaran sebesar Rp. 8.512.210.375,- Anggaran yang diterima sebesar Rp. 1.279.045.000,- dan pelaksanaan revisi terakhir sebesar Rp. 1.348.335.000,-. Pada tahun 2012 pengangggaran sebesar Rp. 4.362.500.000,- Anggaran yang diterima sebesar Rp. 472.725.311,- dan pelaksanaan revisi terakhir sebesar Rp. 1.990.863.000,-. Pada tahun 2013 pengangggaran sebesar Rp. 4.750.000.000,- Anggaran yang diterima sebesar Rp. 6.346.595.000,- dan pelaksanaan revisi terakhir sebesar Rp. 7.199.561.000,-. Pada tahun 2014 pengangggaran sebesar Rp. 8.314.800.000,- Anggaran yang diterima sebesar Rp. 10.457.040.000,- dan pelaksanaan revisi terakhir sebesar Rp. 9.054.015.000,-. Dan pada tahun 2015 pengangggaran sebesar Rp. 5.473.968.000,- Anggaran yang diterima sebesar Rp. 1.375.163.000,- dan pelaksanaan revisi terakhir sebesar Rp. 1.492.741.000,-.

2. Analisis tingkat efektivitas penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh pada tahun 2011 dan 2015 dikategorikan efektif, sedangkan tahun 2012, 2013 dan 2014 dikategorikan cukup efektif dikarenakan pada tahun 2012 tingkat efektivitas sebesar 73,16 % disebabkan adanya kegiatan yang bersumber dari belanja barang tidak berjalan, adapun kegiatan yang tidak berjalan yakni seleksi Anggota KPU Kab/Kota sedangkan pada tahun ini belum dilaksanakan karena belum habisnya masa kerja anggota KPU. Pada tahun 2013 tingkat efektivitas sebesar 87,11% pada tahun ini rendahnya penyerapan/realisasi pada belanja barang dikarenakan tidak

berjalannya beberapa kegiatan dan kegiatan yang terlaksana menyisakan sisa anggaran yang besar dan mengakibatkan rendahnya realisasi pada akhir tahun, selanjutnya tahun 2014 tingkat efektivitas yakni 86,31% pada tahun rendahnya realisasi disebabkan karena tidak terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin dimana anggaran tersebut ditampung pada belanja modal dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak terlaksana seperti pemilihan presiden dan wakil presiden putaran ke II (dua).

3. Analisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, pada tahun 2011, 2012 dan 2015 dikategorikan efisien sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 di kategorikan tidak efisien dikarenakan pada tahun tersebut KPU Kota Payakumbuh tidak menganggarkan anggaran tahapan pelaksanaan pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelaksanaan pemilu tersebut dilaksanakan secara nasional dan anggaran tersebut ditambahkan oleh KPU RI kedalam DIPA KPU Kota Payakumbuh sehingga KPU Kota Payakumbuh melaksanakan pemilihan sesuai dengan anggaran yang diterima dan yang tersedia dalam DIPA.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk KPU Kota Payakumbuh
 - a. Proses penganggaran harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan pemilu sehingga dalam pengajuan anggaran untuk tahun berikutnya, anggaran pelaksanaan pemilu agar dimasukkan dalam penganggaran, diterima atau ditolak anggaran tersebut itu

merupakan keputusan dari KPU Pusat peran KPU Kota Payakumbuh hanya sekedar menganggarkan.

- b. Agar penggunaan belanja lebih efektif dan efisien, di dalam tingkat efektif penggunaan belanja agar naik setiap tahunnya, dengan cara anggaran yang tersedia di DIPA agar cepat direvisi sehingga pencapaian/realisasi (*outcome*) dapat tercapai dengan baik dan dari segi efisiensi dalam proses penganggaran agar anggaran yang diterima tidak melebihi penganggaran KPU Kota Payakumbuh harus lebih aktif lagi dalam berkoordinasi dengan KPU Pusat sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ada.
2. Untuk Peneliti selanjutnya
Agar dapat mengukur tingkat penggunaan anggaran secara keseluruhan penulis memberi saran agar peneliti berikutnya dapat meneliti anggaran belanja hibah pada komisi pemilihan umum Kota Payakumbuh, di mana anggaran hibah tersebut bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kota Payakumbuh.

Referensi

- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Edisi 11, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra, 2013. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Deddi dan Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Haruman, Tendi, 2010. *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*: Jakarta.
- KPU Kota Payakumbuh, 2010. *Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2011*, Laporan Kegiatan.
- KPU Kota Payakumbuh, 2011. *Laporan Keuangan BA 076 Tahun Anggaran 2011*.
- KPU Kota Payakumbuh, 2011. *Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2012*, Laporan Kegiatan.
- KPU Kota Payakumbuh, 2012. *Laporan Keuangan BA 076 Tahun Anggaran 2012*.
- KPU Kota Payakumbuh, 2012. *Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2013*, Laporan Kegiatan.
- KPU Kota Payakumbuh, 2013. *Laporan Keuangan BA 076 Tahun Anggaran 2013*.
- KPU Kota Payakumbuh, 2013. *Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2014*, Laporan Kegiatan.
- KPU Kota Payakumbuh, 2014. *Laporan Keuangan BA 076 Tahun Anggaran 2014*.
- KPU Kota Payakumbuh, 2014. *Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2015*, Laporan Kegiatan.
- KPU Kota Payakumbuh, 2015. *Laporan Keuangan BA 076 Tahun Anggaran 2015*.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Trnasparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Vo.2 No.1.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- M. Nafarin, 2004, "Penganggaran Perusahaan ", Salemba Empat, Jakarta

- M.Nafarin, 2012. *Penganggaran Rencana Kerja perusahaan* . Edisi Kesatu. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan,deddi dan Ayuningtyas.2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawirohardjo, Sarwono, 2005. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia, 2004.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2005.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 ahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2010.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Siagian, Sondang P, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Sumarsono, Sonny, 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Tamasoleng, Adelstin, 2015. “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*”, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Jurusan Program Megister Manajemen. Hal: 97-110